

## ABSTRAK

Judul : Partisipasi Perempuan Minangkabau dalam Pembangunan Nagari (Studi Kasus: Nagari Kamang Mudik Kabupaten Agam)  
Oleh: Syahrizal, Leila Sabani, Damsar.

Sejak tahun 2001 pemerintahan terendah di Sumatera Barat secara bertahap telah berubah dari bentuk pemerintahan desa ke bentuk pemerintahan nagari sejalan dengan munculnya Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2001 untuk kembali ke nagari dengan konsep "adat basandi syarak syarak basandi kitabullah" (adat berdasarkan agama, agama berdasarkan Kitabullah) . Hal ini juga sejalan dengan kehendak sebagian besar masyarakat Sumatera Barat untuk kembali kepada sistem pemerintahan tradisional Minangkabau tersebut yang mana sebelum tahun 1979 juga bernama nagari.

Hal ini tentu bukan berarti kembali ke nagari kembali kepada sistem kehidupan bermasyarakat tradisional seperti sebelum tahun 1979, kembali ke nagari tentu dengan konsep baru untuk menghadapi masa depan yang lebih baik, keadaan yang jelek dalam sistem lama harus ditinggalkan. Berkaitan dengan itu peran perempuan dalam nagari tentu seharusnya mengacu pada prinsip keadilan gender karena menurut Busman Edyar (Kompas,18/3/2002) Perda No. 9 tahun 2001 tersebut dinilai bias gender dan juga dianggap mempersempit ruang gerak perempuan Minang. Senada dengan pandangan tersebut Afrizal (dalam Jurnal Antropologi, 2002:92) juga mengatakan bila dianalisis dari perspektif gender gerakan kembali ke Nagari (yang merupakan implementasi dari Perda No.9 tahun 2001) bias laki-laki.

Kembali ke nagari merupakan pembentukan kembali struktur masyarakat di pedesaan. Terutama berkaitan dengan posisi dalam pemerintahan dan struktur pemerintahan nagari. Begitu juga dengan posisi perempuan dalam masyarakat nagari, hal ini merupakan momentum untuk melihat bagaimana peran dan partisipasi perempuan dan bagaimana kemungkinan pemberdayaan perempuan pada masyarakat Minangkabau umumnya. Untuk lebih jelasnya penelitian ini dapat menjawab permasalahan sebagai berikut : (a)Bagaimana pola pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nagari.(b)Bagaimana pandangan dan respon perempuan terhadap gerakan kembali ke nagari. (c)Sejauh mana partisipasi yang mereka harapkan dan wujudkan dalam pembangunan nagari serta gerakan-gerakan apa saja yang mereka lakukan untuk mewujudkan partisipasi mereka itu.

Penelitian ini akan dilakukan di Kenagarian Kamang Mudik kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan informan tokoh-tokoh masyarakat laki-laki atau perempuan dan masyarakat biasa.

Hasil penelitian menunjukkan kebanyakan perempuan di Kamang Mudik tidak hanya semata-mata bekerja sebagai ibu rumah tangga. Banyak perempuan yang betul-betul bekerja formal yang menghasilkan secara ekonomi misalnya seperti pegawai negeri atau pegawai swasta, atau bekerja secara informal sebagai penunjang ekonomi rumah tangga misalnya sebagai penjahit pakaian, atau

berjualan. Hal ini juga adalah bentuk partisipasi perempuan dalam pembangunan nagari.

Disamping itu aktifitas perempuan yang bisa dikatakan sebagai perwujudan partisipasi perempuan dalam pembangunan nagari adalah aktifitas perempuan dalam lembaga di nagari atau organisasi perempuan yang ada di nagari. Lembaga atau organisasi tersebut adalah seperti Bundo Kanduang, Majelis Taklim, dan Aisyiah. Majelis Taklim dan Aisyiah adalah organisasi sosial keagamaan yang berperan dalam membangun pendidikan atau pembangunan mental. Sedangkan Bundo Kanduang berperan dalam proses pengambilan keputusan di nagari, artinya mereka mempunyai kontribusi dalam perencanaan pembangunan nagari.

Namun dalam pandangan tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan nagari masih dipengaruhi oleh perspektif jender. Sebagian kaum perempuan sendiri dan sebagian besar kaum laki-laki mereduksi peran perempuan ke dalam hal-hal yang bersifat domestik. Misalnya dalam hal-hal yang harus menjadi perhatian perempuan masalah kenakalan remaja, cara berpakaian remaja putri, aturan-aturan dalam baralek perkawinan. Perempuan dikatakan boleh menjadi anggota lembaga nagari tetapi dikatakan perempuan mempunyai keterbatasan karena kodratnya.

**PARTISIPASI PEREMPUAN MINANGKABAU  
DALAM PEMBANGUNAN NAGARI  
(Studi Kasus: Nagari Kamang Mudik Kabupaten Agam)**

**1. Latar Belakang**

Peranan perempuan dalam masyarakat Sumatera Barat sampai sekarang masih merupakan suatu yang perlu menjadi perhatian. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa dalam masyarakat peran perempuan belum seperti yang diharapkan, padahal mereka mempunyai potensi untuk lebih berperan dalam berbagai aspek kehidupan. Banyak perempuan yang telah mengenyam pendidikan tinggi dan tidak ada peraturan yang menghalangi perempuan untuk memperoleh pendidikan dan berkiprah dalam masyarakat sesuai dengan keinginannya. Secara normatif, juga tidak terdapat perbedaan hak antara perempuan dengan laki-laki. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa, "setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan yang layak," dan pasal 31 ayat 1 menyatakan, "tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran." Namun di dalam praktek posisi perempuan tidak seindah yang tergambar dalam peraturan normatif tersebut. Peran perempuan di dalam kehidupan masih dipandang sebelah mata bahkan sering kali tidak dianggap.

Asumsinya mengapa perempuan masih kurang dianggap dalam kehidupan masyarakat disebabkan pengaruh perbedaan persepsi masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Persepsi ini diwarnai oleh budaya yang berkembang di masyarakat yang menentukan bagaimana seharusnya peran laki-laki dan peran perempuan. Laki-laki pada umumnya harus lebih banyak berperan di sektor publik atau di luar rumah yakni mencari nafkah, mengurus urusan keluarga di luar rumah, menjadi wakil keluarga dalam berurusan dengan pihak lain dan sebagainya. Sedangkan perempuan harus lebih banyak di sektor domestik, artinya perempuan yang harus mengurus rumah tangga seperti berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga, memasak, mencuci pakaian anggota keluarga, menggosok, mengasuh anak, mengawasi anak dan sebagainya.

Kaum feminis melihat ini sebagai ketidakadilan terhadap perempuan yang membuat mereka berjuang untuk memperjuangkan hak-hak kaum mereka. Mereka menganggap bahwa pembagian peran perempuan dengan laki-laki seperti itu merupakan peninggalan dari zaman primitif. Pada zaman manusia masih hidup dengan teknologi yang sederhana memang dibutuhkan pembagian kerja yang jelas. Laki-laki pergi berburu dan mencari makanan di hutan sedangkan perempuan di rumah atau di tempat mereka tinggal menjaga anak-anak dan memasak makanan untuk seluruh anggota keluarga. Sekarang dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi mereka menganggap itu tidak cocok lagi perempuan juga bisa berperan di berbagai sektor tidak hanya di sektor domestik. Urusan rumah tangga tidak sesulit zaman dahulu lagi karena ada mesin cuci, lemari es, ada *micro wave* yang membuat urusan rumah tangga menjadi lebih mudah dan itu tidak harus perempuan saja yang mengerjakan urusan rumah tangga. Demikian juga dengan anak-anak, kemajuan dalam ilmu kedokteran keluarga bisa mengatur jumlah anak atau jarak kelahiran yang mereka ingini. Hal ini menyebabkan perempuan tidak perlu lagi berkutat di rumah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya ada yang melihat peran perempuan dan peran laki-laki yang berbeda itu

suatu hal yang fungsional, pembagian peran itu berfungsi untuk keberlangsungan kehidupan manusia secara keseluruhan.

Arif Budiman (1986) melihatnya sebagai pertentangan antara teori *nature* dan teori *nurture*. Teori *nature* menganggap itu adalah sebagai suatu hal yang alamiah atau sudah merupakan kodrat yang diberikan oleh alam kepada manusia yang telah menentukan perbedaan peran laki-laki dan perempuan dan itu berfungsi bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Sedangkan teori *nurture* menganggap perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh faktor bagaimana orang itu dibesarkan atau diasuh dengan kata lain faktor budayalah yang menyebabkan perbedaan peran tersebut.

Tetapi, terlepas dari perbedaan pandangan tersebut kenyataannya sekarang peran perempuan dalam kehidupan masyarakat semakin besar. Perempuan sudah banyak yang muncul dan berkiprah di sektor publik, sudah ada kesepakatan umum dalam masyarakat dan pemerintah untuk lebih meningkatkan peran perempuan. Namun, dari segi kuantitas masih terasa kurang, status dan peran perempuan masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki.

Sejak tahun 2001 pemerintahan terendah di Sumatera Barat secara bertahap telah berubah dari bentuk pemerintahan desa ke bentuk pemerintahan nagari sejalan dengan munculnya Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2001 untuk kembali ke nagari dengan konsep "adat basandi syarak syarak basandi kitabullah" (adat berdasarkan agama, agama berdasarkan Kitabullah). Hal ini juga sejalan dengan kehendak sebagian besar masyarakat Sumatera Barat untuk kembali kepada sistem pemerintahan tradisional Minangkabau tersebut yang mana sebelum tahun 1979 juga bernama nagari.

Hal ini tentu bukan berarti kembali ke nagari kembali kepada sistem kehidupan bermasyarakat tradisional seperti sebelum tahun 1979, kembali ke nagari tentu dengan konsep baru untuk menghadapi masa depan yang lebih baik, keadaan yang jelek dalam sistem lama harus ditinggalkan. Berkaitan dengan itu peran perempuan dalam nagari tentu seharusnya mengacu pada prinsip keadilan gender karena menurut Busman Edyar (Kompas, 18/3/2002) Perda No. 9 tahun 2001 tersebut dinilai bias gender dan juga dianggap mempersempit ruang gerak perempuan Minang. Senada dengan pandangan tersebut Afrizal (dalam Jurnal Antropologi, 2002:92) juga mengatakan bila dianalisis dari perspektif gender gerakan kembali ke Nagari (yang merupakan implementasi dari Perda No.9 tahun 2001) bias laki-laki.

Alasan Afrizal tersebut, *pertama*, definisi komunitas nagari menempatkan perempuan sebagai ibu saja. Nagari didefinisikan sebagai sebuah komunitas hukum adat yang terdiri dari beberapa suku. Komunitas hukum adat tersebut di samping terdiri dari beberapa buah suku, juga harus mempunyai wilayah dengan batas-batas yang jelas dan mempunyai kekayaan komunitas. Komunitas hukum adat tersebut adalah anak nagari, rakyat nagari, atau penduduk nagari (selanjutnya disebut anak nagari saja). Anak nagari terdiri dari ninik mamak (datuk/panghulu), alim ulama, cadiak pandai, pemuda, dan bundo kanduang. Semua komponen tersebut kecuali bundo kanduang, dalam wacana sehari-hari berkonotasi laki-laki. Hal ini terlihat ketika orang mengasosiasikan kategori tersebut dengan jenis kelamin.

Kedua, ada kesadaran kolektif untuk melibatkan perempuan dalam gerakan kembali ke nagari. Namun keterlibatan mereka sangat sedikit karena menurut

analisis Afrizal tersebut disebabkan pereduksian perempuan ke dalam kategori bundo kandung tadi.

Ketiga, persoalan-persoalan perempuan dan partisipasi perempuan dalam mengelola nagari tidak mendapat perhatian khusus dalam perda-perda tentang Nagari. Ada beberapa badan yang mengurus persoalan nagari seperti BPA/RN merupakan badan yudikatif yang bertugas menetapkan peraturan-peraturan nagai bersama wali nagari. BMSAN/MTTS adalah badan yang bertugas memberikan pertimbangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan adat dan agama. LAN adalah suatu badan yang menyangkut pembangunan adat istiadat dan menyelesaikan sengketa tanah dan adat istiadat (sako dan pusako).

Anggota ke tiga badan tersebut pada dasarnya laki-laki. Anggota BPA/RN dipilih oleh anak nagari yang calonnya dari kategori utusan ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kandung, dan pemuda. Dari kategori tersebut sebagaimana juga telah disinggung utusan perempuan hanya di bundo kandung, akibatnya jumlah perempuan yang duduk di BPA/RN jelas sangat sedikit. Kemudian LAN organisasi ninik mamak dalam nagari. Semua ninik mamak laki-laki, jadi jelas semua anggota LAN adalah laki-laki. Hal yang sama juga terjadi pada badan BMSAN/MTTS karena yang duduk di sana adalah alim ulama dan cadiak pandai yang juga dikonotasikan sebagai laki-laki. Dengan demikian dikatakan Afrizal kembali ke nagari adalah proyeknya laki-laki.

## II. Perumusan Masalah

Kebudayaan Minangkabau sebenarnya menempatkan perempuan dalam posisi yang tinggi. Sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau sangat terkenal karena satu-satunya etnis dengan populasi terbesar di dunia yang menganut sistem ini. Sistem kekerabatan matrilineal menentukan perempuan sebagai penentu penghitungan garis keturunan, kelompok kekerabatan adalah berdasarkan garis keturunan perempuan. Laki-laki termasuk kelompok kerabat ibunya atau saudara perempuannya, laki-laki di rumah istrinya hanya sebagai tamu.

Sistem kekerabatan ini kemudian juga menentukan pewarisan terhadap harta berupa tanah atau rumah adalah kepada perempuan. Biasanya anak perempuan yang berhak atas harta pusaka dan rumah peninggalan orang tua mereka. Ada perasaan malu bagi kaum laki-laki untuk menuntut harta pusaka atau peninggalan orang tua. Hal itu yang menjadi salah satu faktor yang mendorong laki-laki di Minangkabau untuk pergi merantau.

Posisi perempuan dalam masyarakat matrilineal Minangkabau adalah suatu hal yang unik, antara struktur sosial dan ekonomi terdapat perbedaan yang tajam. Di dalam struktur sosial perempuan Minangkabau sebenarnya berada pada ranah domestik. Begitu juga cara pandang terhadap perempuan sangat bias gender. Kemuliaan mereka diukur dengan menempatkan mereka sebagai objek. Posisi perempuan dalam membuat keputusan di dalam kerabatnya diwakili oleh kaum laki-laki yang bertindak sebagai datuk pemimpin kaum.

Akan tetapi, di bidang ekonomi kaum perempuan mempunyai posisi yang lebih baik dibanding laki-laki. Paling tidak dalam dua hal, pertama dalam hal warisan (tanah dan rumah) yang hanya diperuntukkan bagi perempuan. Kedua, dalam ikatan suami-istri, laki-laki memang sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Dalam adat-istiadat disebutkan suami sebagai junjungan bagi istri. Oleh karena itu, dia harus patuh pada perintah suami. Tetapi sebenarnya secara ekonomis istri lebih

diuntungkan. Posisi suami dalam struktur rumah tangga Minangkabau lemah karena laki-laki merupakan orang datang di rumah istrinya. Apabila terjadi perceraian, maka yang pergi dari rumah adalah suami walaupun rumah itu dibuat dari penghasilan mereka berdua.

Walaupun di dalam struktur kekerabatan posisi perempuan cukup kuat, namun di dalam struktur social yang lebih luas posisi mereka berada di bawah laki-laki, karena laki-laki mewakili kepentingan keluarga untuk urusan-urusan dengan pihak luar. Sekarang dalam pekerjaan, perempuan sudah banyak terlibat di berbagai sektor sebagai akibat dari semakin banyaknya perempuan yang terdidik. Banyak perempuan yang bekerja di kantor-kantor menjadi pegawai negeri atau menjadi pegawai di perusahaan swasta, menjadi pedagang atau pengusaha. Tetapi, kalau dibandingkan dengan laki-laki peran mereka secara umum masih jauh dari yang diharapkan. Terutama kalau dihubungkan dengan peran perempuan sebagai pemimpin masih sangat jarang perempuan yang menduduki jabatan pimpinan di perusahaan atau di kantor. Artinya posisi perempuan dalam pengambilan keputusan masih kecil dibanding laki-laki, walaupun kesempatan terbuka perempuan masih enggan memasuki dunia politik praktis dan menganggap dunia tersebut milik laki-laki.

Kembali ke nagari merupakan pembentukan kembali struktur masyarakat di pedesaan. Terutama berkaitan dengan posisi dalam pemerintahan dan struktur pemerintahan nagari. Begitu juga dengan posisi perempuan dalam masyarakat nagari, hal ini merupakan momentum untuk melihat bagaimana peran dan partisipasi perempuan dan bagaimana kemungkinan pemberdayaan perempuan pada masyarakat Minangkabau umumnya. Untuk lebih jelasnya penelitian ini dapat menjawab permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pola pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nagari.
- b. Bagaimana pandangan dan respon perempuan terhadap gerakan kembali ke nagari.
- c. Sejauh mana partisipasi yang mereka harapkan dan wujudkan dalam pembangunan nagari serta gerakan-gerakan apa saja yang mereka lakukan untuk mewujudkan partisipasi mereka itu.

### III. Tinjauan Pustaka

Dalam konsep adat lama perempuan dihormati dan disegani, mereka mempunyai status yang tinggi. Kesan ideal perempuan Minangkabau diekspresikan dengan gelar *bundo kanduang*. Secara harfiah berarti ibu kandung tetapi sebenarnya bukan berarti ibu biologis. Bundo Kandung pertama dikenal sebagai nama dari seorang Ratu yang bijaksana, pintar, dan adil dalam mitos Minangkabau yang terkenal Cindua Mato, sekarang sebutan Bundo Kandung diberikan kepada perempuan senior dalam suatu kaum. Seorang perempuan senior diharapkan sebagai seorang yang bijaksana dan kuat, dan mereka memegang posisi kunci dan kewenangan dalam rumah, paruk atau kaum. Oleh sebab itu bundo kanduang yang sebenarnya adalah disamakan dengan seorang perempuan yang mempunyai watak keibuan dan mempunyai kemampuan dalam memimpin (Dr.Rajo Penghulu 1986: 75).

Gambaran ideal tentang perempuan Minangkabau tersebut adalah sebagai akibat atau konsekuensi dari sistem matrilineal itu sendiri. Kecenderungannya sekarang sistem matrilineal mengalami pergeseran. Keluarga ideal dalam sistem matrilineal Minangkabau berbentuk keluarga luas yang disebut dengan istilah *paruik* yaitu dengan memperhitungkan dua generasi di atas ego laki-laki dan satu generasi di bawahnya, keluarga luas semacam ini tinggal dalam satu rumah gadang (Umar Junus dalam Koentjaraningrat, 1997:255). Sekarang kebanyakan keluarga di Minangkabau lebih cenderung berbentuk keluarga inti, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak mereka yang belum kawin.

Kato (1982) menjelaskan walaupun ada pergeseran dalam beberapa hal pada sistem matrilineal, kenyataannya sistem matrilineal itu sendiri masih tetap bertahan hal yang membuatnya tetap bertahan garis keturunan tetap berdasarkan garis ibu, harta pusaka masih diperuntukkan untuk perempuan. Artinya posisi perempuan masih tetap tinggi dalam sistem kekerabatan Minangkabau.

Masyarakat Minangkabau juga terkenal dengan masyarakat yang kental ke Islamannya. Agama Islam menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat adat harus bersendikan agama dengan konsep yang penting untuk itu adalah bahwa Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah artinya adat berdasarkan agama dan agama berdasarkan Al-Quran. Setelah kembali ke nagari konsep ini kembali dikemukakan sebagai landasan kehidupan bernagari menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 dikenal dengan singkatan ABS SBK.

Sekalipun bertujuan baik namun Perda tersebut selain dinilai bias gender juga bias dianggap mempersempit ruang gerak perempuan Minang. Padahal dengan semakin banyaknya kaum terdidik bundo kanduang, tentu saja membuka peluang baginya untuk melakukan hal-hal yang selama ini didominasi laki-laki (Edyar, 2002).

Dalam pandangan agama Islam yang secara umum dipahami bahwa laki-laki lebih tinggi statusnya dari perempuan. Laki-lakilah yang menjadi pemimpin, tetapi hal ini menjadi perdebatan apakah yang dimaksud di sini laki-laki sebagai pemimpin keluarga atau juga sebagai pemimpin dalam masyarakat. Ada yang menafsirkan bahwa laki-laki hanya sebagai pemimpin dalam keluarga dan perempuan boleh saja menjadi pemimpin dalam masyarakat. Dalam Al-Quran digambarkan bahwa Ratu Balqis (seorang perempuan) sebagai seorang pemimpin yang baik (Shihab dalam Hasyim, 2000:23)

Diluar konteks struktur social budaya dan agama dalam masyarakat Minangkabau ada pengaruh budaya nasional dan pemikiran feminis yang berasal dari Barat berkaitan dengan peran perempuan dalam masyarakat. Nama R.A.Kartini sangat terkenal di Indonesia sebagai tokoh yang menjadi pejuang emansipasi wanita. Kartini melalui tulisan-tulisan dan aktifitasnya berjuang untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan Indonesia, dia digambarkan sebagai tokoh yang berjasa melahirkan ide-ide untuk meningkatkan peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Perjuangan dan ide-ide utama dari R.A.Kartini diajarkan melalui kurikulum di sekolah dari SD sampai SMU. Secara umum sekarang masyarakat Sumatera Barat atau Minangkabau sudah menyadari pentingnya pendidikan dan tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah. Perempuan tidak dibatasi lagi memperoleh pendidikan setinggi-tingginya dan memilih pekerjaan sesuai dengan keinginan mereka.

Peranan perempuan dalam masyarakat yang kemudian bisa berwujud partisipasi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat bisa dipandang dari sudut struktural dan cultural seperti uraian di atas. Kedua pendekatan itu mencoba melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat berdasarkan sesuatu yang telah ditentukan. Pandangan teoritis dari sudut struktural melihat masyarakat umumnya dipaksa oleh struktur tertentu untuk bertindak artinya manusia di dunia ini tidak mempunyai kebebasan. Ketika dia lahir dia masuk ke dalam suatu kelompok masyarakat dan dia harus bertindak sesuai dengan struktur yang telah ada dalam masyarakatnya yang seolah-olah memaksa dia. Artinya manusia tidak bebas menentukan sendiri apa yang ingin diperbuatnya.

Pandangan dari sudut kultural juga demikian, pandangan ini melihat manusia bertindak dibingkai oleh kebudayaannya. Konsepnya adalah kebudayaan sebagai pola dari kelakuan dan tindakan manusia tersebut, artinya di sini manusia juga tidak bebas menentukan sendiri kelakuan

#### **IV. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memperoleh pemahaman mengenai :

- a. Pola-pola pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nagari.
- b. Pandangan dan respon perempuan terhadap gerakan kembali ke nagari.
- c. Partisipasi yang diharapkan dan ujudkan perempuan dalam pembangunan nagari serta gerakan-gerakan apa saja yang mereka lakukan untuk mewujudkan partisipasi mereka itu.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang masalah partisipasi perempuan dalam pembangunan nagari bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan tentang perempuan di Minangkabau. Pengetahuan tentang pandangan dan respon perempuan terhadap gerakan kembali ke nagari, partisipasi yang diharapkan dan ujudkan perempuan dalam pembangunan nagari serta gerakan-gerakan yang mereka lakukan untuk mewujudkan partisipasi mereka itu. Secara terapan penelitian ini bermanfaat untuk gerakan emansipasi perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi atau keikutsertaan perempuan yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat.

#### **V. Metode Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Kenagarian Kamang Mudik kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Pada dasarnya semua nagari di Sumatera Barat berpeluang untuk diteliti mengingat permasalahan seperti yang diungkapkan di atas pasti ada di setiap nagari. Ada beberapa alasan yang menarik untuk memilih nagari Kamang Mudik karena nagari ini dikenal sebagai daerah perjuangan sejak perang Paderi sampai perang kemerdekaan tahun 1945 sampai 1948. Di samping itu masyarakatnya sangat kuat memegang nilai-nilai adat dan agama Islam. Gerakan keagamaan seperti Muhammadiyah dan Perti berkembang secara bersamaan dan mempunyai pengaruh yang kuat di sini. Aktifis untuk kedua gerakan keagamaan itu tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan.



## 2. Teknik Penelitian

### a. Pengumpulan Data Sekunder

Hal yang dimaksudkan di sini adalah hal-hal yang dilakukan pada tahap pertama penelitian berupa usaha untuk memperoleh gambaran umum tentang masyarakat yang akan diteliti. Pertama untuk memperoleh gambaran statistik masyarakat yang diperoleh dari kantor pemerintah atau dinas/instansi yang berhubungan masalah penelitian.

Selanjutnya menentukan lokasi penelitian, setelah diketahui lokasi penelitian akan diusahakan izin penelitian dari pemerintah setempat. Tahap selanjutnya mengidentifikasi informan-informan yang akan dipilih dalam penelitian.

### b. Pengumpulan Data Primer

Pada tahap awal pengumpulan data primer ini adalah observasi di nagari dengan melakukan pengamatan terhadap partisipasi perempuan dalam pembangunan nagari yang terpilih sebagai lokasi penelitian. Dalam observasi peneliti mencoba mengamati aktifitas perempuan sehari-hari dalam nagari. Keterlibatan perempuan dalam pekerjaan sehari-hari, jenis-jenis pekerjaan apa yang mereka geluti dan keterlibatan mereka dalam kelembagaan pemerintahan nagari.

Pada tahap berikutnya pengumpulan data primer adalah melakukan wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh masyarakat di nagari, dinas/instansi terkait di propinsi, kabupaten, dan kecamatan. Semua wawancara berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu mengungkap partisipasi dan gerakan perempuan dalam pembangunan nagari, mengidentifikasi usaha yang dilakukan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nagari, dan mempelajari program pemberdayaan perempuan dari masing-masing dinas/instansi terkait.

Kemudian wawancara juga dilakukan dengan tokoh-tokoh perempuan dalam masyarakat nagari yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan nagari pada umumnya. Wawancara mendalam berikutnya dengan perempuan yang bukan merupakan tokoh masyarakat mengenai pandangan dan pendapat mereka tentang bagaimana partisipasi dan peran mereka sendiri dalam pembangunan nagari.

## 3. Analisa Data

Pertama, hasil pengumpulan data dan informasi akan dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan penelitian. Data yang terkumpul dalam penelitian ini yang berbentuk bukan angka dianalisa mulai dari saat proses pengumpulan data berlangsung hingga saat penulisan hasil penelitian dilakukan. Mulai dari menulis hasil pengamatan, hasil wawancara mendalam, dan hasil diskusi dalam focus group serta kemudian menyajikannya.

Kedua data yang diperoleh melalui survey setelah dilakukan pengeditan kemudian data diolah dengan komputer. Hasil pengolahan data ini merupakan analisa kuantitatif terutama analisis statistik terhadap factor penentu pemberdayaan perempuan dalam pembangunan nagari.

## VI. Personalia Penelitian

No.	N a m a	Gol.	Jabatan	Bidang Ilmu
1.	Drs. Syahrizal, M.Si NIP. 131 912 582	III d	Ketua	Antropologi
2.	Leila Sabani BP.99 1912 042	Mhs.	Anggota	Antropologi
3.	Dr.Damsar, MA NIP. 131 018 619	IV a	Pembimbing	Sosiologi

## VII. Hasil Penelitian

Berikut ini diuraikan hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di desa Kenagarian Kamang Mudik tentang Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Nagari.

### VII. 1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Nagari Kamang Mudik adalah bagian dari Kecamatan Kamang Magek kabupaten Agam, dahulu termasuk kecamatan Tilatang Kamang baru 3 tahun terakhir kecamatan Tilatang Kamang dipecah menjadi dua bagian yang pertama tetap bernama kecamatan Tilatang Kamang dengan tiga nagari yaitu Kapau, Gadut, dan Koto Tangah. Kemudian bagian yang kedua bernama Kecamatan Kamang Magek dengan tiga nagari pula yaitu Kamang Mudik, Kamang Hilir, dan Magek.

Nagari ini terletak 12 Km sebelah utara kota Bukittinggi. Dari kota Bukittinggi jalan menuju kenagarian ini bisa melalui dua jalan kabupaten yaitu pertama dari arah Simpang Tembok melalui pacuan Kuda Bukit Ambacang terus ke Gadut setelah itu jalan lurus sampai di nagari Kamang Mudik. Kemudian juga bisa melalui jalan Simpang Limau di depan Hotel Pusako Bukittinggi di mana sebelum sampai di Kamang Mudik adalah melewati Simpang Kapau dan Pekan Kamis.

Alamnya cukup indah di sebelah utara di pagari oleh bukit barisan yang terlihat berlapis-lapis, dan di dalam wilayah nagari terdapat beberapa buah bukit yang berdiri seperti teronggok di sebuah lembah. Kalau memandang ke arah selatan terlihat gunung Merapi dan Singgalang. Kamang Mudik berada pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, membuat udara cukup sejuk dan dingin di pagi hari.

Kamang Mudik berbatasan sebelah selatan dengan nagari Magek, sebelah utara dengan kabupaten Lima Puluh Kota, sebelah Timur dengan Nagari Kamang Hilir, dan sebelah Barat dengan kecamatan Palupuh. Perbatasan dengan kabupaten Lima Puluh Kota dibatasi oleh bukit barisan, demikian juga dengan kecamatan Palupuh, belum ada jalan yang bisa dilewati kendaraan hanya ada jalan setapak kalau orang ingin pergi ke kedua wilayah itu dari Kamang Mudik.

Tentang asal kata *kamang* ada beberapa versi pertama adalah berasal dari kata "kamanga", dan ada yang menjelaskan berasal dari kata "kama waang" akhirnya sampai pada kata kamang, dan ada juga yang berpendapat kata itu berasal dari nama pohon kamang yang buahnya besar dan rasanya asam.

Kenagarian Kamang Mudik terdiri dari delapan wilayah bagian yang disebut jorong dan dipimpin oleh kepala jorong. Jorong tersebut adalah jorong Bansa, jorong Pakan Sinayan, jorong Babukik, jorong Halalang, jorong Pauah, jorong Durian, jorong Air Tabik, jorong Padang Kuniyik.

Nagari kamang Mudik mempunyai luas wilayah 6.264 Ha. Dari luas itu penggunaan lahan diantaranya adalah untuk perumahan 476 ha. Untuk pertanian sawah 1016 ha yang terdiri dari sawah irigasi 265 ha dan tadah hujan 751 ha. Perkebunan rakyat 454 ha dan pertanian tanah kering atau ladang 1046 ha. Wilayah juga nagari juga terdiri dari hutan yaitu hutan negara 774 ha dan hutan nagari 2480 ha (Profil Nagari Kamang Mudik, 2003).

Penduduk kenagarian Kamang Mudik berjumlah 10.781 jiwa dengan jumlah KK 2586. Berdasarkan jenis kelamin penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki yaitu 347 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 5217 jiwa dan penduduk perempuan 5564 jiwa. Hal ini mungkin disebabkan oleh lebih banyaknya laki-laki yang pergi merantau dari pada perempuan (Profil Nagari Kamang Mudik, 2003).

Dari segi pendidikan penduduk nagari Kamang Mudik bisa dilihat tidak tamat SD 970 jiwa, tamat SD 560 jiwa, tamat SLTP 580 jiwa, tamat SLTA 580, tamat Akademi/PT 99 jiwa (Profil Nagari Kamang Mudik, 2003). Berdasarkan data ini bisa disimpulkan sebagian besar penduduk berpendidikan SLTP ke atas, yang boleh dikatakan masyarakat Kamang Mudik cukup terdidik.

Mata pencaharian sebagian besar penduduk nagari Kamang Mudik adalah menjadi petani yaitu 2588 jiwa. Mata pencaharian berikutnya adalah PNS/TNI yang terdiri dari guru, pegawai kantor pemerintah, TNI, atau polisi berjumlah 415 jiwa. Terakhir mata pencaharian yang juga banyak adalah menjadi buruh tambang batu kapur sebanyak 225 jiwa (Profil Nagari Kamang Mudik, 2003).

## VII. 2. Organisasi Sosial dan Sistem Kekerabatan

Sebagaimana sistem kekerabatan Minangkabau masyarakat nagari Kamang Mudik juga menganut sistem matrilineal. Sistem kekerabatan yang menghitung garis keturunan melalui garis ibu. Masyarakat nagari atau penduduk Kamang Mudik sebenarnya adalah penduduk yang berdasarkan garis ibu tersebut.

Kelompok kekerabatan terkecil dalam masyarakat Minangkabau sebenarnya adalah *paruik* yang biasanya tinggal dalam sebuah rumah gadang. *Paruik* adalah kelompok kekerabatan yang lebih luas dari keluarga luas (*extended family*) dalam istilah antropologi. *Paruik* adalah kelompok kekerabatan yang terdiri dari dua generasi di atas seorang *ego* laki-laki dan satu generasi di bawahnya. Bisa diartikan seorang laki-laki mempunyai nenek perempuan, saudara laki-laki dan perempuan nenek, dan keturunan nenek dan saudara perempuan nenek tersebut sampai sederajat satu generasi di bawah *ego* itulah yang disebut dengan satu *paruik*. Selain tinggal dalam satu rumah gadang *paruik* juga suatu ikatan ekonomi mereka memiliki bersama lahan berupa sawah atau ladang.

Sekarang seperti kebanyakan di wilayah lain Minangkabau di Kamang Mudik kesatuan *paruik* boleh dikatakan tidak ada lagi yang tinggal dalam satu rumah gadang. Biasanya mereka telah tinggal terpisah-pisah dalam satu rumah yang umumnya berbentuk keluarga inti dan sebagian kecil berbentuk keluarga luas. Tetapi umumnya mereka masih tetapi tinggal dalam lingkungan ikatana kerabat

matrilineal. Artinya apabila suatu keluarga inti membangun rumah baru mereka tetap membangunnya di lingkungan kerabat ibunya.

Ikatan-ikatan kekerabatan masih kuat yang dapat dilihat dalam aktifitas misalnya upacara-upacara lingkaran hidup seperti kelahiran, perkawinan, pengangkatan gelar penghulu, dan kematian. Dalam upacara-upacara seperti ini terlihat hubungan kekerabatan masih memegang peranan penting, siapa yang menjadi tuan rumah atau terlibat dalam pelaksanaan upacara, siapa yang hadir, yang diundang atau yang datang menunjukkan pola-pola hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan tersebut berdasarkan hubungan satu keturunan atau satu suku dan juga berdasarkan hubungan karena perkawinan atau juga disebut hubungan *bako anak pisang*.

Ikatan kekerabatan di atas paruk disebut dengan *kaum*, kaum adalah ikatan kekerabatan matrilineal yang merupakan gabungan dari beberapa paruk. Kaum dipimpin oleh seorang penghulu yang bergelar Datuk. Kaum di Kamang Mudik kelompok-kelompok kecil dari klen matrilineal yang dalam istilah Minangkabau disebut suku. Ada 7 suku induk di Kamang Mudik masing-masing suku induk tersebut terpecah menjadi beberapa suku lagi. Suku induk yang ada di Kamang Mudik tersebut adalah Koto, Jambak, Pisang, Bodi, Sikumbang, Piliang, dan Melayu. Jumlah penghulu yang memimpin kaum di Kamang Mudik adalah 303 penghulu.

Organisasi Sosial yang bukan berdasarkan ikatan kekerabatan mungkin sama dengan daerah-daerah lainnya. Seperti organisasi sosial yang berdasarkan ikatan keagamaan contohnya Muhammadiyah dan persatuan Tarbiyah Islamiah (Perti). Berikutnya adalah organisasi seperti koperasi, perkumpulan pemuda, dan juga organisasi politik tingkat nagari..

Muhammadiyah dan Perti sama-sama mempunyai pengaruh yang kuat di Kamang Mudik, dalam arti kedua organisasi ini sama-sama mempunyai aktifitas menonjol. Muhammadiyah memiliki perguruan dari TK sampai Madrasah Aliyah yang terletak di Pakan Sinayan, demikian juga Perti juga memiliki hal yang sama, Perti memiliki dua perguruan yaitu di Pakan Sinayan dan Babukik.

### VII.3 Perempuan dan Aktifitasnya di Kamang Mudik

Perempuan di nagari Kamang Mudik terutama masih sangat berperan di sektor domestik. Peran yang sebenarnya milik sebagian besar perempuan di seluruh dunia. Kalau di rumah mereka sangat berperan dalam aktifitas rumah tangga, seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Pekerjaan ini benar-benar menjadi monopoli perempuan. Suami biasanya membantu untuk pekerjaan rumah tangga yang dianggap berat seperti membersihkan pekarangan, mengambil kayu, memperbaiki bagian rumah atau perabot yang rusak.

Walaupun demikian sebenarnya kebanyakan perempuan di Kamang Mudik tidak hanya semata-mata bekerja sebagai ibu rumah tangga. Banyak perempuan yang betul-betul bekerja formal yang menghasilkan secara ekonomi misalnya seperti pegawai negeri atau pegawai swasta, atau bekerja secara informal sebagai penunjang ekonomi rumah tangga misalnya sebagai pedagang, penjahit pakaian, atau berjualan. Cuma data pekerjaan berdasarkan jenis kelamin tidak ada dalam data buku Profil Nagari Kamang Mudik.

Dalam pekerjaan pertanian perempuan sangat berperan biasanya dalam keluarga yang pekerjaan utamanya di bidang pertanian perempuan terlibat dalam hampir semua tahap pekerjaan pertanian tersebut. Kalau di spesialisasikan dalam tahap ke sawah misalnya perempuan bertugas menanam, menyiangi, dan proses pemisahan padi yang bernas dan hampa.

Sekarang cukup banyak perempuan di Kamang Mudik yang bekerja sebagai penjahit sulaman bordir. Sulaman bordir ini adalah untuk dijadikan sebagai jilbab, baju, atau mukena. Namun umumnya mereka masih sebagai pekerja, pekerjaan itu diberikan oleh pengusaha yang datang dari Nagari Gadut atau kecamatan IV Angkat – sebuah kecamatan yang terletak di sebelah Timur Bukittinggi –.

Pekerjaan yang juga cukup potensial menambah pendapatan keluarga adalah pembuatan kerupuk ubi yang dikenal dengan *kerupuk kamang*. Pembuatan kerupuk ini banyak terdapat di jorong Pakan Sinayan. Kerupuk ini dibuat dari ketela pohon yang direbus kemudian digiling dengan mesin sederhana diberi garam dan daun bawang kemudian ditipis-tipiskan dan dibuat bulatan sebesar kaleng susu cair. Bulatan ini dijemur sampai kering dan kerupuk sudah siap untuk digoreng. Kerupuk ini dijual ke pasar Bukittinggi, dan dari Bukittinggi menyebar ke pasar-pasar di Sumatera Barat.

Perempuan yang berasal dari keluarga yang kurang berada ada juga yang berjualan kecil-kecilan di pasar-pasar sekitar nagari dan ada juga yang berjualan di pasar Bukittinggi. Selain berjualan ada juga yang bekerja menjadi penggiling cabe di pasar-pasar di Bukittinggi. Sebagian juga ada yang bekerja sebagai pengambil upah memanen sayur-sayuran di Padang Luar – sebuah daerah penghasil sayur di Selatan Bukittinggi – mereka pergi pagi dan pulang sore.

Dari uraian tentang gambaran pekerjaan perempuan dalam kehidupan sehari-hari di atas terlihat bahwa perempuan bukan orang yang pasif menunggu apa yang diberikan oleh suami saja. Tetapi mereka terlibat langsung bekerja atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Dalam bidang pendidikan sekarang umumnya masyarakat tidak lagi membedakan anak laki-laki dan anak perempuan. Peluang untuk sekolah sama antara anak laki-laki dan perempuan, orang tua tidak membeda-bedakan siapa yang harus sekolah anak laki-laki atau perempuan. Kalau orang tua mampu dan anak laki-laki atau anak perempuannya sama-sama mampu dari segi kepintaran untuk melanjutkan sekolah orang tua tidak akan membeda-bedakannya.

#### **VII. 4. Pemberdayaan Perempuan Untuk Berpartisipasi dalam Pembangunan Nagari dan Respon Perempuan Terhadap Gerakan Kembali Kenagari**

Kembali ke nagari di Nagari Kamang Mudik terjadi pada tahun 2001 artinya sekarang sudah 3 tahun masyarakat Kamang Mudik kembali ke Nagari atau kembali bernagari. Kembali ke nagari adalah berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 9 tahun 2000 dan Peraturan Daerah Agama No. 3 tahun 2001.

Pemberdayaan perempuan untuk pembangunan nagari secara eksplisit tidak kelihatan. Tetapi ada keuntungan setelah kembali ke nagari ada satu lembaga tempat bernaungnya kaum perempuan Minangkabau yang disebut sebagai Bundo Kandung. Kedudukan lembaga ini di nagari setara dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), Majelis Ulama Nagari (MUN), dan

Majlis Adat dan Syarak Nagari (Mamas). Semasa pemerintahan Orde Baru lembaga ini tidak muncul kepermukaan.

Lembaga Bundo Kanduang ini termuat dalam Perda Agama No. 31 tahun 2001, dalam Perda itu dijelaskan Bundo Kanduang sebagai salah satu lembaga di Nagari sama dengan KAN, MUN, atau MAMAS. Tetapi Perda itu tidak menjelaskan Bundo Kanduang tersebut secara terperinci seperti keanggotaan dan fungsinya. Dalam Perda istilah Bundo Kanduang hanya tiga kali muncul. Pertama, menyebutkan mengenai panitia pemilihan Wali Nagari yang menyebutkan bahwa panitia pemilihan nagari terdiri dari unsur BPRN, KAN, MUN, Mamas, Bundo Kanduang, dan Lembaga Kemasyarakatan lain sebanyak-banyak 7 orang (Pasal 24, ayat 2). Kedua, tentang tugas penjabat Walinagari, disebutkan bahwa tugas penjabat Wali Nagari pada awal berlakunya Perda yaitu membentuk BPRN bersama unsur Ulama, Ninik Mamak, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, Generasi Muda, dan Kelompok Fungsional lainnya (Pasal 44, ayat 3). Terakhir, menyangkut keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) di mana disebutkan keanggotaan BPRN mencerminkan unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, dan Generasi Muda yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 7 orang (Pasal 78 ayat 1).

Seperti yang telah disebutkan di atas Bundo Kanduang kedudukannya sama dengan lembaga-lembaga lain di nagari. Pemerintahan nagari telah membentuk lembaga Bundo Kanduang yang sekarang anggotanya 25 orang. Pembentukannya adalah berdasarkan perwakilan dari delapan jorong di nagari Kamang Mudik, masing-masing jorong mengutus 3 orang anggotanya plus 1 yang berasal dari jorong yang dianggap penduduknya lebih padat, yaitu jorong Pauh. Pemilihan mereka menurut Wali Nagari adalah berdasarkan ketokohan perempuan tersebut di masing-masing jorong.

Aktifitas Bundo Kanduang sejauh ini adalah berkumpul satu kali sebulan, membicarakan organisasi atau berdiskusi tentang banyak hal misalnya agama, adat, pemerintahan, dan pendidikan. Biasanya pada acara diskusi ini diundang narasumber tergantung dengan topik yang dibicarakan, misalnya mengundang Ulama kalau bicara agama, mengundang ahli adat kalau bicara tentang adat, dan mengundang Wali Nagari bila bicara persoalan pemerintahan.

Program khusus pemberdayaan perempuan digariskan dari atas atau pemerintah daerah tidak ada. Hanya dengan membentuk lembaga Bundo Kanduanglah yang dianggap pengejawantahan dari usaha untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan nagari.

Disamping Bundo Kanduang sebenarnya ada PKK, tetapi tidak berhubungan dengan aktifitas sosial politik perempuan dalam masyarakat. PKK lebih diarahkan untuk meningkatkan ketrampilan wanita di sektor domestik, seperti masak memasak, atau jahit menjahit.

Menurut Tuangku Sati anggota BPRN tentang kedudukan perempuan dalam nagari sekarang kalau dibandingkan dengan dulu sudah semakin nampak. Kalau pada tahun 80-an atau 90-an pada waktu itu aktifitas perempuan hanya dimanifestasikan pada PKK. Menurut dia selanjutnya setelah kembali ke nagari ada Bundo Kanduang dan dimasukkan ke dalam lembaga Nagari. Sekarang peranan Bundo kanduang tersebut sudah mulai terlihat.

Pememrintah memeberikan dana untuk aktifitas PKK sebanyak 1 juta dalam setahun, sedangkan dana untuk aktifitas Bundo kanduang sebanyak Rp

500.000,- setahun. Oleh Bundo Kandung dana yang ada itu digunakan untuk berbagai kegiatan diantaranya untuk acara-pertemuan satu kali ebuahn tersebut. Karena dana tersebut sebenarnya tidak mencukupi anggota Bundo Kandung menyumbangkan dana pribadi untuk aktifitas lembaga mereka. Kalau ada undangan-undangan untuk acara-acara di Kecamatan atau Kabupaten mereka menggunakan biaya sendiri.

Secara umum perempuan merespon dengan baik gerakan kembali ke nagari, seperti yang telah diuraikan. Beberapa orang informan mengatakan bahwa kembali ke nagari membuat partisipasi masyarakat semakin tinggi dalam membangun nagari secara sosial atau ekonomi.

Aktifitas-aktifitas sosial semakin banyak, kalau dulu sebelum bernagari masyarakat terkotak-kotak dalam desa-desa. Sekarang orang berpikir tidak lagi perdesa sudah terasa kebersamaan diantara warga masyarakat. Selain aktifitas Bundo Kandung dan PKK ada aktifitas kaum perempuan yang juga untuk kemajuan masyarakat nagari yaitu kegiatan Majelis Taklim, dan Senam Lansia. Majelis Taklim kegiatannya adalah di tiap jorong dengan mengadakan wirid sekali dalam 15 hari dan Majelis Taklim gabungan jorong mengadakan wirid sekali dalam satu bulan. Senam Lansia adalah kegiatan orang lanjut usia yang anggotanya yang paling banyak adalah perempuan. Kedua aktifitas ini menjadi marak setelah kembali ke nagari, hal yang membuktikan bahwa respon perempuan terhadap gerakan kembali ke nagari sangat positif.

#### **VII. 5. Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Nagari**

Uraian pada sub bab sebelumnya sebagian sudah menggambarkan partisipasi perempuan dalam pembangunan nagari. Namun mungkin apa yang diuraikan masih dalam bentuk organisasi-organisasi perempuan yang menjadi wadah aktifitas mereka. Juga gambaran-gambaran aktifitas perempuan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Bundo Kandung memang adalah lembaga resmi di nagari yang anggotanya perempuan tetapi bukan berarti selain itu di lembaga lain perempuan tidak ada. Pada Badan Perwakilan Anak nagari (BPRN) terdapat 3 anggota perempuan. Jumlah anggota BPRN sama juga dengan Bundo Kandung yaitu 25 orang, persentase mereka memang masih sedikit di BPRN ini. Ketiga anggota BPRN perempuan tersebut berasal dari Bundo kandung.

Dalam pemerintahan nagari BPRN adalah lembaga Legislatif yang bertugas mengawasi tugas lembaga eksekutif nagari yaitu Wali Nagari dan perangkat pemerintahannya. Menurut ketua Bundo Kandung nagari Kamang Mudik melalui anggotanya yang terdapat di BPRN inilah perempuan Kamang Mudik bisa berperan atau berpartisipasi pembangunan nagari. Mereka bisa mengusulkan atau meminta apa-apa yang bisa dilakukan untuk pembangunan nagari, atau mengkritik apa yang telah dilakukan oleh eksekutif untuk membangun nagari.

Menurut seorang anggota BPRN laki-laki anggota BPRN yang perempuan rajin mengkitu rapat BPRN mereka juga cukup aktif dalam memberikan pendapat dalam rapat-rapat tersebut. Satu orang anggota BPRN laki-laki lain menjelaskan perempuan lebih banyak diam, dari tiga orang anggota BPRN hanya satu orang yang sering bicara sedangkan yang lain tidak banyak bicara. Seorang anggota BPRN perempuan menyebutkan memang yang banyak berbicara itu laki-laki

tetapi perempuan lebih banyak mendamaikan atau mendengahi kalau sudah banyak bertengkar perempuan yang menegahi.

Aktifitas Bundo Kandung Kamang Mudik yang cukup menarik adalah kunjungan mereka ke Harian Singgalang pada tanggal 15 Agustus 2004. Kunjungan mereka dimuat di harian Singgalang 16 Agustus 2004. Pada halaman 13 Harian Singgalang tersebut terdapat judul berita "BK Kamang Mudik Kunjungi Singgalang" berita yang dimuat adalah sebagai berikut:

Harapan untuk segera direalisasikannya bantuan pompa air oleh pemerintah ke kenagarian Kamang Mudik dikemukakan oleh anggota Bundo Kandung Kenagarian Kamang Mudik Kecamatan kamang Magekyang melakukan kunjungan ke Harian Singgalang, Minggu (15/8). Dalam Dialog yang digelar di Rattan Room Singgalang, Rombongan yang dipimpin oleh ketua Bundo Kandung Zulidar keinginan mereka agar pemerintah segera mewujudkan janji-janjinya untuk pengadaan pompa air tersebut.

Sebanyak 25 anggota Bundo kandung serta beberapa orang anggota majlis taklim yang hadir juga mengharapkan agar lampu jalan di nagarnya segera dihidupkan dan disamaratakan dengan bantuan untuk MDA di daerah itu.

Ketua Litbang Diklat Haji Adi Bermasa didampingi Koordinator Redaktur Widya Navies yang menerima kunjungan mengungkapkan bahwa setiap masyarakat berhak memasukkan berita ke koran Singgalang. "yang penting adalah bagaimana ibu-ibu dapat mengatasi persoalan secara bersama", ujar Adi Bermasa.

Berita yang termuat di hari Singgalang tersebut menunjukkan aktifitas perempuan dalam hal ini Bundo kandung nagari Kamang Mudik yang cukup menarik. Menurut ketua Bundo kandung Zulidar, pergi ke harian Singgalang tersebut murni ide mereka sendiri. Tujuan mereka sebenarnya datang ke Singgalang adalah untuk memperluas wawasan tentang proses pembuatan koran. Mereka memanfaatkan kunjungan ke Singgalang tersebut untuk menyampaikan kepada pemerintah usulan untuk membangun nagari mereka.

Sebenarnya pada hari yang sama sebelum ke harian Singgalang mereka terlebih dahulu singgah di Panti Sosial Sasana Tresna Werda – untuk orang-orang jompo – Sabai Nan Aluih di Sicincin Pariaman. Mereka pergi ke Panti Jompo ini juga untuk memperluas wawasan bagaimana pengelolaan panti jompo dan melihat dari dekat bagaimana penanganan orang-orang lanjut usia di Panti tersebut.

Selain Bundo Kandung kelompok wanita yang juga aktif dalam pembangunan adalah Aisyiah, organisasi perempuan yang berada di bawah Muhammadiyah. Aisyiah di Kamang Mudik memiliki empat ranting masing-masing di Pakan Sinayan, Air tabik, Durian, dan Pauh. Kegiatan Aisyiah terupama bergerak di Bidang sosial keagamaan dan pendidikan. Mereka aktif mengurus anak-anak yatim dan pendidikan TK atau MDA.

Menurut ketua Bundo Kandung dalam pemerintahan nagari Bundo Kandung mempunyai andil dalam pembentukan Peraturan Nagari (Perna) di mana usulan dari Bundo Kandung untuk salah satu aturan dalam Perna tersebut diterima. Usulan tersebut adalah tentang aturan pemberian kado kepada istri dari kerabat laki-laki yang dalam istilah Kamang Mudiak disebut *malapeh*. Kado tersebut berupa kain dan kewajiban dari penganten baru untuk membalas pemberian tersebut



dengan mengantar makanan dalam satu talam ke rumah orang yang memberi kain tersebut. Persoalannya adalah malapeh ini jadi memberatkan kepada penganten baru karena selain membutuhkan waktu juga biayanya bisa lebih mahal dari harga kain yang diberikan. Jadi dalam peraturan nagari dibuat bahwa tidak boleh lagi malapeh tersebut kecuali Ibu kandung atau Bako Kandung penganten laki-laki.

Selain peran yang dimainkan Bundo Kandung seperti telah disebutkan, sebagian peran yang diharapkan Bundo Kandung mencerminkan tugas-tugas bersifat perempuan, berikut adalah seperti yang diungkapkan oleh salah seorang anggota Bundo Kandung:

Sebenarnya masih banyak tugas Bundo Kandung itu contohnya anak gadis menjunjung talam sebenarnya itu kan tidak pas menurut adat, itu harus diperbaiki tetapi berangsur-angsur. Untuk memperbaikinya ya di rumah tangga masing-masing ndak bisa sekaligus dilakukan Bundo Kandung, karena orang tuanya yang menyuruh. Tata tertib menurunkan *jamba* itu kan ada kaki diturunkan tidak boleh jongkok, sekarang sembarang saja jadi masih harus diperbaiki

Seorang anggota Bundo Kandung lain mengungkapkan tugas Bundo Kandung dalam kegiatan gotong royong yang kebetulan dilakukan untuk membuka sebuah jalan adalah menyediakan makanan untuk mereka yang ikut gotong royong. Hal ini memperlihatkan bahwa peran Bundo Kandung diarahkan kembali ke sektor domestik bukan sebagai kelompok yang mengambil peran dalam pembuatan keputusan.

Mengenai pendapat perempuan tentang bagaimana seharusnya peran perempuan dalam pembangunan nagari. Bisa dilihat dari bagaimana pandangan perempuan tentang keanggotaan pada lembaga-lembaga nagari. Sekarang seperti yang telah diungkapkan di atas perempuan hanya ada di BPRN selain Bundo Kandung. Menurut beberapa orang perempuan (2 orang masyarakat biasa dan 1 orang anggota Bundo Kandung) perempuan bisa menjadi anggota lembaga-lembaga lain di nagari seperti MUN – ulama juga bisa perempuan –, MAMAS, dan perempuan juga bisa menjadi Wali Nagari. Sedangkan menurut mereka menjadi anggota KAN tidak bisa perempuan karena anggota KAN semuanya ninik mamak atau penghulu.

Peran perempuan tentu juga dipengaruhi oleh bagaimana pandangan laki-laki terhadap peran yang seharusnya dimainkan oleh perempuan. Informan laki-laki umumnya melihat positif kembali ke nagari untuk peran perempuan. Kalau sebelumnya perempuan hanya ada dalam PKK dalam struktur pemerintahan desa tetapi setelah ada nagari ada lembaga Bundo Kandung. Tetapi informan laki-laki melihat perempuan masih dalam struktur gender. Untuk berpartisipasi dalam pembangunan nagari perempuan bisa sebagai penyokong di belakang, kalau ada kegiatan perempuan yang menyediakan makanan. Perempuan bertanggung jawab untuk membentuk generasi yang lebih baik dengan mendidik anak-anak mereka sopan santun dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan adat. Karena menurut mereka itu adalah tugas ibu karena ibu yang sering di rumah.

Selanjutnya menurut informan laki-laki perempuan dalam kelembagaan nagari bisa saja menjadi anggota atau menjadi Wali Nagari. Tetapi sebenarnya perempuan mempunyai keterbatasan karena kodratnya misalnya dia terbatas untuk beraktifitas.

## VIII. Kesimpulan

Sebenarnya kebanyakan perempuan di Kamang Mudik tidak hanya semata-mata bekerja sebagai ibu rumah tangga. Banyak perempuan yang betul-betul bekerja formal yang menghasilkan secara ekonomi misalnya seperti pegawai negeri atau pegawai swasta, atau bekerja secara informal sebagai penunjang ekonomi rumah tangga misalnya sebagai penjahit pakaian, atau berjualan. Hal ini juga adalah bentuk partisipasi perempuan dalam pembangunan nagari.

Disamping itu aktifitas perempuan yang bisa dikatakan sebagai perwujudan partisipasi perempuan dalam pembangunan nagari adalah aktifitas perempuan dalam lembaga di nagari atau organisasi perempuan yang ada di nagari. Lembaga atau organisasi tersebut adalah seperti Bundo Kanduang, Majelis Taklim, dan Aisyiah. Majelis Taklim dan Aisyiah adalah organisasi sosial keagamaan yang berperan dalam membangun pendidikan atau pembangunan mental. Sedangkan Bundo Kanduang berperan dalam proses pengambilan keputusan di nagari, artinya mereka mempunyai kontribusi dalam perencanaan pembangunan nagari.

Namun dalam pandangan tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan nagari masih dipengaruhi oleh perspektif jender. Sebagian kaum perempuan sendiri dan sebagian besar kaum laki-laki mereduksi peran perempuan ke dalam hal-hal yang bersifat domestik. Misalnya dalam hal-hal yang harus menjadi perhatian perempuan masalah kenakalan remaja, cara berpakaian remaja putri, aturan-aturan dalam baralek perkawinan. Perempuan dikatakan boleh menjadi anggota lembaga nagari tetapi dikatakan perempuan mempunyai keterbatasan karena kodratnya.

## IX. Daftar Pustaka

- A.A.Navis, 1984. *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta, Grafiti Pers.
- Afrizal, 2002, "Rekonstruksi Nagari dan Gerakan Perempuan", dalam *Jurnal Antropologi*, Tahun IV No. 6.
- Arief Budiman, 1981. *Pembagian Kerja Secara Sexual*, Jakarta, Gramedia.
- Alfian dan Dewi Fortuna Anwar, 1983. "Wanita dalam Masyarakat Minangkabau", dalam *Masyarakat Indonesia*.
- Hester, Marianne, 1996. *Women Violence and Male Power*, Buckingham, Open University Press.
- Idrus Hakimi Dt.Rajo Penghulu, 1986. *Pegangan Penghulu Bundo Kanduang, dan Pidato Alua Pasambahan Adat Minangkabau*. Bandung, Remadja Karya.
- Kartini Syahrir, 1988. *Mengapa Studi Wanita Penting*, Jakarta, Makalah.
- Kato, Tsuyoshi. 1982. *Matriliney and Migration*, Ithaca, Cornell University Press

- Marwan Kari Mangkuto, 2003. *Adat Salingka Nagari Kanagirian Kamang Mudiak*, Pemerintah Kenagarian Kamang Mudiak.
- Peter Hagul, 1985. "Penelitian Tantang Kependudukan dan Status Wanita Indonesia" dalam *Prisma* 10, 1985.
- Quraish Shihab, 1999. "Membongkar Hadits Hadits Bias Gender" dalam Shafiq Hasyim (Ed.) *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, Jakarta, JPPR.
- Reenen, Joke van. 1996. *Central Pillars oh the House*, Leiden, Research School of CNWS.
- Sutan Takdir Alisyahbana, 1983. "Sistem Matrilineal Minangkabau dan Revolusi Kedudukan Perempuan di Zaman Kita" dalam AA Navis (Ed.) *Dialektika Minangkabau dalam Kemelut Sosial dan Politik*, Padang, Genta Singgalang Press.
- Syahrizal, 1992. *Kekerabatan dan Distribusi Kekuasaan Studi Tentang Perbedaan Peran Antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Aceh*, Banda Aceh, P3IIS Universitas Syiah Kuala.
- Umar Junus. 1996. "Manusia dan Kebudayaan Minangkabau" dalam Koentjaraningrat (Ed.) *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Artikel :
- Busman Edyar, *Minangkabau dan Sensitivitas Jender*, Kompas 18 Maret 2002.
- Yurnaldi, *Perempuan Sumatera Barat Antara Potensi dan Prestasi*, Kompas 18 Maret 2002.
- Aunur Rofiq, *Diskursus Keadilan Jender di Mesir*, Kompas 18 Maret 2002.